



LAKIP

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

2020

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

KATA PENGANTAR



Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja dari Kementerian Kesehatan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Kelas II Padang Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2020 dalam kurun waktu 2020 – 2024 serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.

Semoga segala upaya yang telah kita lakukan mendapat rahmat dan ridho-Nya.

Padang, 25 Januari 2021 Kepala KKP Kelas II Padang,

dr. Jalil Alfani, M.Kes NIP. 196603111999031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2020. Rencana kinerja 2019 dan perjanjian kinerja 2020 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024 yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang telah memenuhi sasaran yang ditargetkan dan menunjukan peningkatan capaiaan kinerja target yang ditetapkan. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, yaitu Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan, Indikator presentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, indikator indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara, indikator indeks nilai kinerja anggaran, indikator presentase tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan, indikator Kinerja implementasi WBK dan indikator presentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

Dari semua indikator yang telah ditetapkan, capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang telah melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga ratarata capaian indikator kinerja Tahun 2020 sebesar 125,69%

Untuk mencapai target indiaktor kinerja yang telah ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang pada Tahun 2020 mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp. 13.331.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.272.784.061,- atau 92,06%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Visi dan Misi	1
B. Latar Belakang	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sumber Daya	5
G. Sistimatika Penulisan	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV. PENUTUP	65
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

		Halam	ıan
1.	Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Padang		5

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 1.1	Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang	7
2.	Tabel 1.2	Distribusi Anggaran Berdasarkan Jenis kegiatan	9
3.	Tabel 2.1	Matrik rencana Aksi kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024	13
4.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2020	15
5.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
6.	Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kegiatan	18
7.	Tabel 3.2	Upaya yang Dilakukan Dalam Pengendalian Faktor Risiko pada Orang Tahun 2020	27
8.	Tabel 3.3	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Kelas II Padang Tahun 2020	54
9.	Tabel 3.4	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020	59
10.	Tabel 3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas II Padang Tahun 2020	60
11.	Tabel 3.6	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	61
12.	Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan KKP Kelas II Padang Tahun 2020	61
13.	Tabel 3.8	Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	62

DAFTAR GRAFIK

\mathbf{H}	2	വ	m	21
	а	ıa		aı

1.	Grafik 1.1	Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang Tahun 2020	5
2.	Grafik 1.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2020	6
3.	Grafik 1.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Seksi/ Subbag Tahun 2020	7
4.	Grafik 1.4	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2020	7
5.	Grafik 1.5	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	8
6.	Grafik 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Pemeriksaan Orang Tahun 2020	20
7.	Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	21
8.	Grafik 3.3	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Tahun 2020	21
9.	Grafik 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kedua	24
10.	Grafik 3.5	Jenis Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang Tahun 2020	25
11.	Grafik 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Faktor Risiko Orang yang dikendalikan Tahun 2020	26
12.	Grafik 3.7	Perbandingan Penerbitan Free Pratique dengan Restricted Pratique Tahun 2020	28
13.	Grafik 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Faktor Risiko Alat Angkut yang Dikendalikan Tahun 2020	29
14.	Grafik 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Faktor Risiko Barang yang Dikendalikan Tahun 2020	31
15.	Grafik 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Faktor Risiko Lingkungan yang Dikendalikan Tahun 2020	33
16.	Grafik 3.11	Target dan Pencapaian Kinerja Indek Pengendalian di Pintu Masuk Di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	36
17.	Grafik 3.12	Persentase Target dan Capaian Kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	37
18.	Grafik 3.13	Distribusi Laporan Sirveilens Epidemiologi Pada KKP Kelas II Padang Tahun	38

19.	Grafik 3.14	Trend Pelaksanaan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD,KLB dan Bencana) di Wilayah Layanan KKP Kelas II Padang Tahun 2020	39
20.	Grafik 3.15	Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Pinjal pada Tikus Tertangkap di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	40
21.	Grafik 3.16	Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Larva Perimeter Area di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	41
22.	Grafik 3.17	Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Larva Anopheles sp di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	42
23.	Grafik 3.18	Target dan Pencapaian Kinerja Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	43
24.	Grafik 3.19	Target dan Pencapaian Kinerja Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	44
25.	Grafik 3.20	Pengawasan TTU Memenuhi Syarat Kesehatan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	45
26.	Grafik 3.21	Target dan Pencapaian Kinerja Tempat Pengolahan Makanan Laik Hygiene di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	46
27.	Grafik 3.22	Target dan Pencapaian Kinerja Tempat Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020	47
28.	Grafik 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020	47

BAB I PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal P2P 2020 - 2024 tidak ada visi dan misi tersendiri, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Dengan demikian visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang juga mengikuti visi tersebut.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui misi pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa aman pada SeluruhWarga
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- i. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara kesatuan

B. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*/ tata kelola

pemerintahan yang baik dan sekaligus result oriented government /pemerintah yang berorentasi pada output/ outcome. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan (Performance-base Management) pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran setiap tahunnya.

Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan, serta perkembangan tehnologi tranportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (new infection diseases, emerging infections diseases, dan re-emerging infections diseases), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping kemajuan teknologi diberbagai bidang lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan pergerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Perintah.

KKP Kelas II Padang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala KKP Kelas II kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka KKP Kelas II Padang mempunyai tugas tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi .

- 1. Pelaksanaan kekarantinaan;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- 4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- 5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- 6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;

- 7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- 8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- 10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- 11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- 12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- 13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- 14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
- 15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- 16. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 17. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

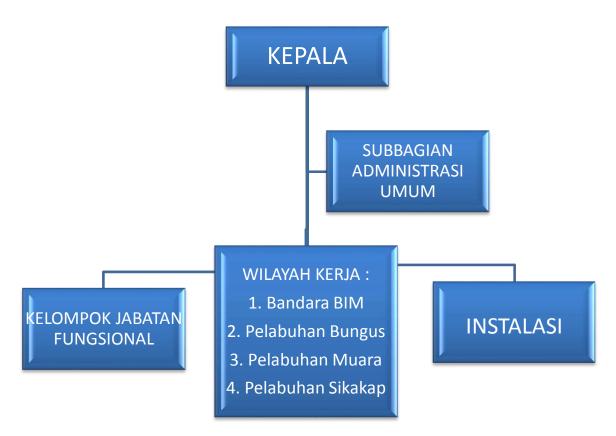
E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tatakerja KKP Kelas II Padang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas II Padang terdiri atas :

- 1. Sub Bagian Administrasi Umum
- 2. Instalasi
- 3. Wilayah Kerja
- 4. Kelompok jabatan fungsional

Selengkapnya tentang struktur organisasi KKP Kelas II Padang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Padang



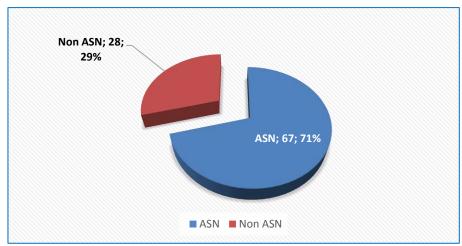
F. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah pegawai KKP Kelas II Padang sebanyak 95 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

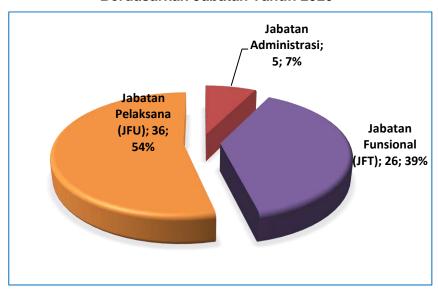
Grafik 1.1 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020



Pada tahun 2020 jumlah pegawai KKP Kelas II Padang yang ASN/ PNS sebanyak 67 orang (71%) dan honorer sebanyak 28 orang (29%).

b. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

Grafik 1.2
Distribusi Pegawai ASN KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2020



Pada tahun 2020 jumlah pegawai KKP Kelas II Padang sebagian besar (54%) adalah dengan jabatan fungsional umum sebanyak 36 orang dan hanya 26 orang (39%) dengan jabatan fungsional tertentu.

c. Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020

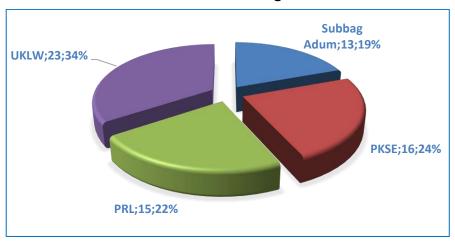
No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV.b	1	1%
2	IV.a	6	9%
3	III.d	8	12%
4	III.c	10	15%
5	III.b	12	18%
6	III.a	16	24%
7	II.d	11	16%
8	II.b	1	1%
9	l.b	1	1%
	Jumlah	67	100

Dari tabel 1.1 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang paling banyak mempunyai pangkat Penata Muda golongan IIIa, yaitu sebanyak 16 orang (24%), kemudian golongan Penata Muda Tk.l/ IIIb sebanyak 12 orang

(18%) dan paling sedikit adalah dengan golongan IV/b, II/b dan I/b masingmasing 1 orang (1%).

d. Distribusi Pegawai Berdasarkan Seksi/ Subbag

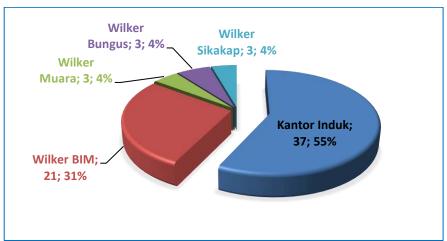
Grafik 1.3 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang Berdasarkan Seksi/ Subbag Tahun 2020



Dari grafik 1.3 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2020, paling banyak terdapat pada seksi Unit Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW), yaitu sebanyak 23 orang (34%) dan paling sedikit adalah pegawai Kasubag TU, yaitu sebanyak 13 orang (19%).

e. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas

Grafik 1.4 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang Berdasarkan Tempat Tugas Tahun 2020

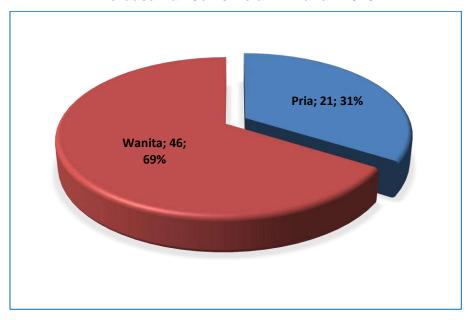


Dari grafik 1.4 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2020, lebih dari separuh bertugas di kantor induk, yaitu sebanyak 37 orang (55%), dan

paling sedikit terdapat di wilker Muara Padang, Bungus, dan Sikakap yaitu masingmasing sebanyak 3 orang (4%).

f. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 1.5
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Dari grafik 1.5 dapat diketahui, bahwa pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2020, jumlah pegawai pria dan wanita yaitu wanita 46 orang (69%) dan pria 21 orang (31%).

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, KKP Kelas II Padang didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2020 anggaran KKP Kelas II Padang terdiri dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.331.300.000,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sumberdana berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber Dana Anggaran ini dibagi menjadi 2 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Distribusi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan

Di KKP Kelas II Padang Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12.169.473.000,-
2.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.161.827.000,-
	Jumlah	13.331.300.000,-

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Kinerja KKP Kelas II Padang terdiri dari :

- 1. KATA PENGANTAR
- 2. RINGKASAN EKSEKUTIF
- 3. BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Visi dan Misi
 - B. Latar Belakang
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Tugas Pokok dan Fungsi
 - E. Struktur Organisasi
 - F. Sumber Daya
 - G. Sistematika Penuilisan

4. BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Padang.

5. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi penggunaan sumber daya

6. BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatkan kinerjanya.

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang m enerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan (dalam hal ini Kepala KKP Kelas II Padang) dan pemberi amanah atau atasan langsungnya (dalam hal ini Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2020 di lingkungan KKP Kelas II Padang termuat dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 KKP Kelas II Padang.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, KKP Kelas II Padang telah menyusun RAK tahun 2020 – 2024, yang merupakan gambaran yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tersebut, termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan organisasi

melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan.

1. Rencana Aksi Kegiatan

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Uraian RAK KKP Kelas II Padang Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

	Sasaran Program (Outcome) /	Target					Dononggung
No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung Jawab
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 21.052	17.374	18.240	19.132	20.069	21.052	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%	90%	90%	90%	95%	100%	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 80%	80%	80%	80%	80%	80%	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
4	Nilai kinerja anggaran sebesar 85%	80%	82%	83%	84%	85%	Subbag Adum
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 85%	80%	81%	82%	83%	85%	Subbag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80%	70%	73%	74%	75%	80%	Subbag Adum
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 70%	45%	50%	60%	65%	70%	Subbag Adum

2. Rencana Kinerja Tahunan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang merupakan proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukannya menjadi suatu issu yang strategis yang

harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RAK juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2020, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Padang Tahun 2020

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Pencegahan dan	1 Menurunnya angka	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	Pengendalian Penyakit	kesakitan akibat	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		penyakit yang	3 Layanan Perkantoran	1 Layanan

	dapat dicegah	4	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1 Layanan			
	dengan imunisasi, peningkatan	imunisasi, peningkatan	5	Layanan Pengendalian factor risiko pada situasi khusus	1 Layanan		
	surveilans dan karantina kesehatan.	6	Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM	1 Layanan			
	2 Meningkatnya pencegahan dan	7	Layanan Pengendalian factor risiko pada alat angkut,orang dan barang	1 Layanan			
	pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.	8	Layanan Kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC	110 Layanan			
	3 Menurunnya angka kesakitan dan	9	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan COP	300 Layanan			
	kematian akibat penyakit menular langsung	akibat penyakit	akibat penyakit	akibat penyakit	10	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC	207 Layanan
		11	Layanan tindakan penyehatan alat angkut	20 Layanan			
	4 Meningkatnya Dukungan	12	Layanan Pengendalian Vektor DBD	40 Layanan			
	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	13	Layanan Survei Vektor Pes	47 Layanan			
		Tugas Teknis	14	Layanan Pengendalian vector Diare	20 Layanan		
	Lainnya Pada Program Pencegahan	15	Layanan Pengendalian vector Malaria	4 Layanan			
	dan Pengendalian	16	Layanan survei Vektor DBD	240 Layanan			
	Penyakit	17	Layanan survei Vektor Malaria	24 Layanan			
		18	Layanan survei Vektor Diare	40 Layanan			
		19	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV	10 Layanan			
		20	Layanan Deteksi Dini terduga TBC wilayah kerja KKP	11 Layanan			

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai atasan langsungnya untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020

NI.	CACADAN	INDIVATOR			
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		
1 Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di		Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, 1 barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	440.496		
	Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%		
		3 Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	80%		
		4 Nilai kinerja anggaran	80		
		Persentase tingkat kepatuhan 5 penyampaian Laporan Keuangan	80%		
		6 Kinerja implementasi WBK satker	70		
		7 Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%		

Pada Perjanjian Kinerja KKP Pelabuhan Kelas II Padang di alokasikan anggaran sebesar Rp. 13.331.300.000,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mengukur kinerja kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2020, terdapat beberapa sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen

Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020. Berikut adalah target dan capaian indikator kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2020.

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kegiatan
KKP Kelas II Padang Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	440.496	625.728	142,05%
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	100%	111%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	80%	100%	125%
4	Nilai kinerja anggaran	80	87,34	109,17%
5	Presentase tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan	80%	100%	125%
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	79,84	114,05%
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	69,11%	153,59%

Dari tabel diatas diketahui 7 indikator dapat terealisasi melewati target yang telah ditetapkan dan dengan capaian kinerja rata – rata sebesar 125,69%.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR PERTAMA

Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan

1. Pengertian

Pelabuhan laut dan udara sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit juga merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit *new emerging diseases* dan *re-emerging diseases* yang memiliki implikasi besar dan faktor risiko besar dan potensial dalam penyebaran penyakit.

Kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara merupakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko di pelabuhan atau bandara, berupa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit serta meminimalisasikan dampak resiko penularan penyakit dan lingkungan terhadap masyarakat. Sehingga tupoksi KKP dapat dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan dilakukan di pintu masuk Negara yang ada di wilayah kerja KKP Kelas II Padang, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pelabuhan Muara, Pelabuhan Bungus, dan Pelabuhan Sikakap. Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin setiap hari.

2. Defenisi Operasional

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan di pintu masuk Negara. Pemeriksaan orang dilakukan terhadap setiap pelaku perjalanan dari dan ke daerah terjangkit, serta *skreening* penyakit menular langsung (HIV dan TBC) terhadap masyarakat yang berada di wilayah kerja KKP Kelas II Padang. Begitu juga dengan pemeriksaan alat angkut, barang dan lingkungan.

3. Rumus / Cara Perhitungan

 $N = X/Y \times 100 \%$

Keterangan:

N = Persentase jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

X = Jumlah capaian pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Y = Target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan

 $\frac{\textit{Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan}}{\textit{Target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan}}x~100\%$

4. Capaian Indikator

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Sehubungan dengan telah ditetapkannya kasus novel coronavirus 2019 sebagai PHEIC oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020, dan kasus konfirmasi positif pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2021, maka KKP Kelas II

Padang semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap seluruh pelaku perjalanan dari dan ke wilayah terjangkit. Pemeriksaan ini dilakukan pada setiap pelaku perjalanan, baik itu penumpang maupun ABK di Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Sikakap dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Hal ini juga berimbas pada melonjaknya capaian target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan di KKP Kelas II Padang, sehingga target capaian yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja awal mengalami revisi sebanyak 2 kali. Target yang disusun di awal tahun 2020 adalah sebanyak 17.396 pemeriksaan. Lalu mengalami revisi pada bulan Mei 2020 menjadi 75.580 pemeriksaan dan revisi lagi pada bulan November menjadi 440.496 pemeriksaan.

Capaian ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (471,19%) capaian KKP Padang lebih rendah.

800.000 400.000 200.000 TARGET CAPAIAN

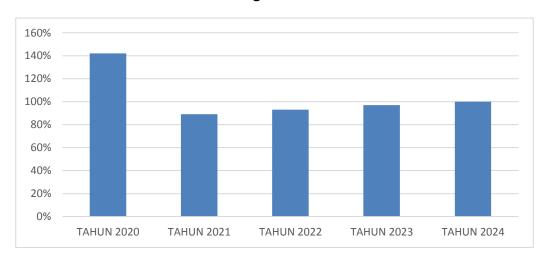
Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Pemeriksaan Orang
Tahun 2020

Sumber : Laporan bulanan seksi UKLW KKP Kelas II Padang Tahun 2020

- Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan beberapa tahun terakhir Indikator kinerja Tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

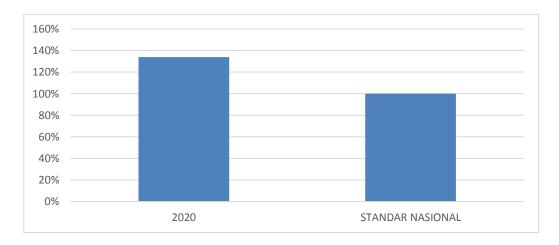
Grafik 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi



d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional
Tahun 2020



- e. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja
 - Jumlah pemeriksaan orang di pintu masuk Negara melebihi target sebanyak 141% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 sehingga seluruh pelaku perjalanan dari dan ke wilayah terjangkit harus diperiksa seluruhnya.
 - Seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 dan meningkatnya wilayah terjangkit, maka setiap alat angkut / kapal yang datang dari dalam dan luar

- negeri diperiksaan sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan. Sehingga pemeriksaan alat angkut meningkat menjadi 235 % dari target yang telah ditetapkan.
- Sementara itu, pada pemeriksaan barang, hanya mencapai 60% dari target karena jumlah permohonan pemeriksaan penerbitan sertif ikat kesehatan hanya sebanyak 3 permohonan.
- Pemeriksaan lingkungan tidak mengalami hambatan, sehingga capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan, sebanyak 100 %.

5. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- Bekerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dalam upaya melakukan pemeriksaan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berangkat dan datang dari dan ke wilayah terjangkit.
- Bekerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Sikakap dalam upaya pemeriksaan seluruh penumpang / awak kapal dan alat angkut yang berangkat dan datang dari wilayah terjangkit.
- Meningkatkan pendidikan kesehatan (penkes) kepada seluruh sasaran baik secara lisan maupun melalui media seperti banner.
- Melakukan pemeriksaan barang (OMKABA) sebanyak permohonan pemeriksaan yang diajukan ke KKP Kelas II Padang.
- Melakukan pemeriksaan lingkungan yang berada di wilayah kerja KKP Kelas II Padang.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Kurangnya kerjasama antar *stakeholder* di Bandara dan Pelabuhan sehingga komunikasi lintas sektor kurang berjalan.
- Aturan tentang persyaratan perjalanan sering berubah sehingga terkadang ada beberapa oknum yang menolak untuk diperiksa.

- Kurangnya sosialisasi tentang syarat perjalanan.
- Ada beberapa pelaku perjalanan laut yang masih kurang informasi mengenai prosedur karantina kesehatan.
- Kurangnya permohonan pemeriksaan OMKABA

7. Pemecahan Masalah

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor agar pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan bisa maksimal.
- Meningkatkan sosialisasi tentang aturan-aturan terbaru mengenai aturan perjalanan ataupun kekarantinaan orang, alat angkut, barang, serta pemeriksaan lingkungan.

INDIKATOR KEDUA

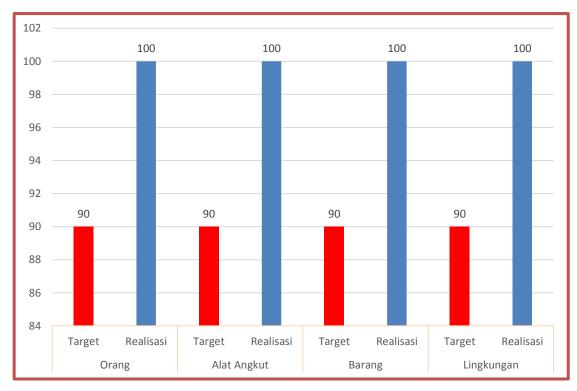
Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

Secara umum realisasi indikator target dan realisasi kegiatan adalah 100%, yang artinya setiap faktor risiko pada orang tahun 2020 dapat dikendalikan

$$\frac{832}{832}$$
 X 100% = 100%

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi capaian indikator
Di KKP Kelas II Padang Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari grafik tersebut diketahui bahwa capaian target dengan realisasi capaian kinerja indikator sebesar 111.11%. begitu juga perbandingan dengan target nasional dan target jangka menengah sebesar 111.11%

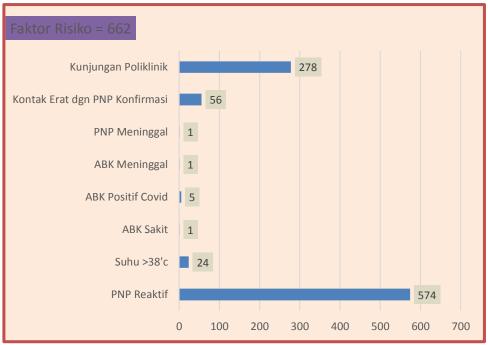
A. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang

1. Pengertian

Orang yang dimaksud adalah setiap pelaku perjalanan (Penumpang dan ABK) yang datang dan berangkat melalui Bandara/Pelabuhan dalam wilayah kerja KKP Kelas II Padang.

Faktor risiko yang ditemukan yaitu penumpang dengan suhu di atas >38'c, penumpang yang kontak erat, ABK dan penumpang yang sakit, ABK dan penumpang yang meninggal, Kunjungan pelaku perjalanan ke Poliklinik KKP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.5
Jenis Faktor Risiko yang Dikendalikan pada orang
Tahun 2020 Di KKP Kelas II Padang



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indikator ini adalah jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang di pelabuhan/bandara dibandingkan dengan jumlah faktor risiko pada orang dalam periode satu tahun

3. Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan orang dibagi jumlah faktor risiko pada orang dikali 100%

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan:

N = Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang

X = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang

Y = Jumlah faktor risiko pada lingkungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang Target faktor risiko yang dikendalikan pada orang x 100%

4. Capaian

Capaian indikator target dan realisasi kegiatan adalah 100%, yang artinya setiap faktor risiko pada orang tahun 2020 dapat dikendalikan

<u>662</u> X 100% = 100% 662

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Faktor Risiko Orang yang dikendalikan Tahun 2020 Di KKP Kelas II Padang



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian target dengan realisasi capaian kinerja indikator sebesar 111.11%. begitu juga perbandingan dengan target nasional dan target jangka menengah sebesar 111.11%.

Analisis keberhasilan capaian target dikarenakan semua faktor risiko yang disebabkan oleh orang selalu dikendalikan oleh petugas.

Capaian ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (155,55%) capaian KKP Padang lebih rendah.

5. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan

Tabel 3.2
Upaya yang dilakukan Dalam Pengendalian Fator Risiko Pada Orang
Tahun 2020 Di KKP Kelas II Padang

No	Jenis Faktor Risiko	Jumlah	Upaya Pengendalian
1	PNP Reaktif	574	Batal Berangkat, Notifikasi ke Dinkes, anjuran Swab
2	Suhu >38'c	24	Notifikasi Ke Dinkes
3	ABK Sakit	1	Rujukan ke RS
4	ABK Positif Covid	5	Isolasi Ke PPSDM Sumatera Barat
5	ABK Meninggal	1	Evakuasi dan di rujuk ke RS M.Djamil Padang, Notifikasi kewilayah
6	PNP Meninggal	1	Evakuasi dan di rujuk ke RS M.Djamil Padang, Notifikasi kewilayah
8	Kontak Erat dgn PNP Konfirmasi	56	NotifikaSi Ke Dinkes
9	Kunjungan Poliklinik	278	Pemeriksaan dan pengobatan serta rujukan
Total		662	

6. Kendala/ Permasalahan

Sulitnya memberikan pengertian kepada calon penumpang yang akan berangkat dengan status hasil rapid test reaktif/positif, sehingga penumpang tidak diperbolehkan untuk berangkat.

7. Pemecahan Masalah

Bekerja sama dengan satgas covid-19 dan lintas sektor terkait ketika menghadapi penumpang yang komplain kepada petugas dan langsung mengirim notifikasi penumpang yang reaktif ke dinas kab/kota

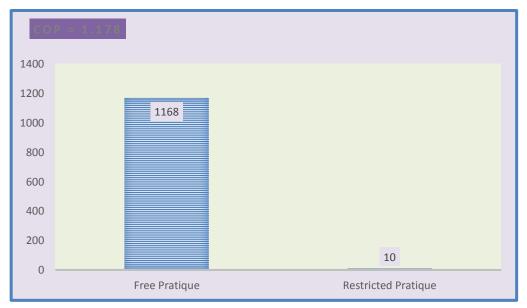
B. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

1. Pengertian

Alat angkut yang dimaksud adalah Kapal yang datang dari daerah/ Wilayah terjangkit yang dilakukan pemeriksaan dengan status kapal dalam karantina,

jika kapal tersebut tidak memiliki factor risiko maka akan diterbitkannya Certificate of Pratique dengan status Free Pratique (Izin Lepas Karantina), sedangkan pada kapal yang memiliki factor risiko diterbitkan Restricted of Pratique (Izin Lepas Terbatas Karantina) dan dilakukannya pengendalian terhadap faktor risiko tersebut. Kemudian kapal yang diduga membawa penumpang yang sakit menimbulkan kegawadaruratan kesehatan masyarakat dilakukan Desinfeksi sebanyak 34 kapal. Pada tahun 2020 free Pratique (FP) terbit sebanyak 1.168 lembar dan Restricted Pratique (RP) sebanyak 10 lembar, perbandingan penerbitan FP dan RP dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.7
Perbandingan Penerbitan Free Pratique dengan Restricted Pratique
Tahun 2020 Di KKP Kelas II Padang



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indikator ini adalah jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut di pelabuhan/bandara dibandingkan dengan jumlah faktor risiko pada alat angkut dalam periode satu tahun

3. Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan alat angkut dibagi jumlah faktor risiko pada orang alat angkut dikali 100%

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

 $N = X/Y \times 100\%$

Keterangan:

N = Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

X = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut

Y = Jumlah faktor risiko pada alat angkut

 $\frac{\textit{Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut}}{\textit{Target faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut}}x~100\%$

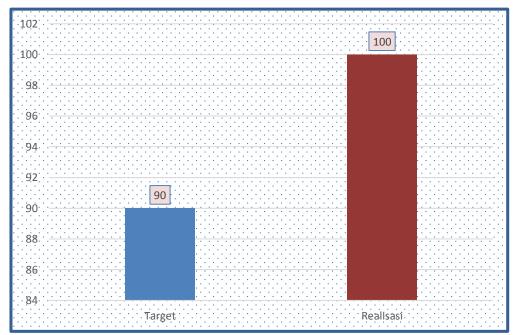
4. Capaian

Capaian indikator target dan realisasi kegiatan adalah 100%, yang artinya setiap faktor risiko pada alat angkut pada tahun 2020 dapat dikendalikan

$$\frac{44}{44}$$
 X 100% = 100%

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Faktor risiko alat angkut yang dikendalikan Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian target dengan realisasi capaian kinerja indikator sebesar 111,11%. begitu juga perbandingan dengan target nasional dan target jangka menengah sebesar 111.11%.

Analisis keberhasilan capaian target dikarenakan setiap faktor risiko yang terdapat pada alat angkut semuanya dilakukan tindakan pengendalian.

Capaian ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (155,55%) capaian KKP Padang lebih rendah.

5. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan

Melakukan Desinfeksi untuk kapal yang membawa penumpang sakit yang diduga akan menyebabkan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, serta Bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyediakan jasa penyehatan alat angkut seperti Fumigasi dan Desinseksi.

6. Kendala/ Permasalahan

- Jauhnya lokasi labuh Kapal pada area karantina sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menuju kapal tersebut,jika kapal masih mempinyai muata maka kegiatan penyehatan akan tertunda
- pihak ke tiga yang memenuhi syarat sesuai aturan dalam melaksanakan desinseksi/Fumigasi hanya PT. Sucofindo.

7. Pemecahan Masalah

Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Navigasi untuk menetapkan area labuh kapal max 2 mil dan berkoordinasi dengan PT. Sucofindo jika akan melakukan tindakan penyehatan kapal.

C. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada barang

1. Pengertian

Barang yang dimaksud adalah yang barang yang akan diterbitkan sertifikat OMKABA yang di minta oleh pihak importir sebelum dikirim ke luar negeri

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indikator ini adalah jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada barang di pelabuhan/bandara dibandingkan dengan jumlah faktor risiko pada barang dalam periode satu tahun

3. Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan barang dibagi jumlah faktor risiko pada barang dikali 100%

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

 $N = X/Y \times 100\%$

Keterangan:

N = Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada barang

X = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada barang

Y = Jumlah faktor risiko pada barang

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada barang x 100% Target faktor risiko yang dikendalikan pada barang

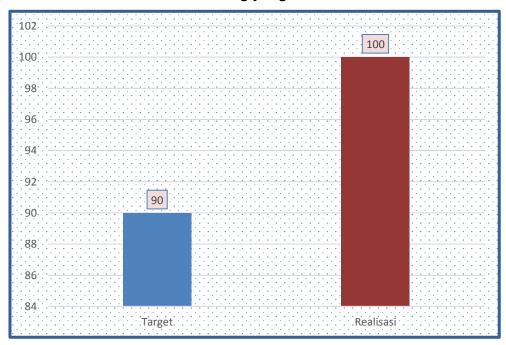
4. Capaian

Capaian indikator target dan realisasi kegiatan adalah 100%, yang artinya setiap faktor risiko pada barang pada tahun 2020 dapat dikendalikan

$$\frac{3}{3}$$
 X 100% = 100%

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Faktor risiko barang yang dikendalikan Tahun 2020



 $Sumber: Laporan \ bulanan \ kegiatan \ Surveilans \ Epidemiologi \ KKP \ Kelas \ II \ Padang \ Tahun \ 2020$

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian target dengan realisasi capaian kinerja indikator sebesar 111.11%. begitu juga perbandingan dengan target nasional dan target jangka menengah sebesar 111.11%.

Analisis keberhasilan capaian target dikarenakan semua permintaan pemeriksaan barang yang akan di impor oleh perusahaan importir selalu dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan ke Laboratorium sesuai standar parameternya, jika hasil memenuhi syarat maka sertifikat OMKABA diterbitkan.

Capaian ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (155,55%) capaian KKP Padang lebih rendah.

5. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan

Pengambilan sampel dan pengiriman ke Laboratorium yang sudah memiliki izin dari kememnkes, setelah hasil laboratorium keluar maka petugas menganalisa apakah sampel tersebut layak diterbitkan sertifikat OMKABA

6. Kendala/ Permasalahan

Laboratorium tempat pemeriksaan sample OMKABA yang telah memiliki izin dari KEMENKES dan dapat melakukan pemeriksaan dengan cepat hanya PT. Sucofindo.

7. Pemecahan Masalah

Melakukan koordinasi dengan PT. Sucofindo sehingga setiap sampel yang dikirim segera diperiksa.

D. Persentase Faktor Risiko Yang Dikendalikan Pada Lingkungan

1. Pengertian

Lingkungan yang dimaksud adalah tempat pengolahan makanan, Hygiene sanitasi gedung dan bangunan, inspeksi sarana air bersih yang terdapat pada lingkungan Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas II Padang. Jenis faktor risiko pada pada tempat pengolahan makanan dan Hygenie sanitasi gedung dan bangungan adalah penjamah makanan tidak menerapkan prinsip PHBS dalam bekerja, tidak tersedianya sarana tempat sampah yang tertutup, tidak adanya fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan sabun, kondisi toilet tidak bersih.

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional indikator ini adalah jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan di pelabuhan/bandara dibandingkan dengan jumlah faktor risiko pada lingkungan dalam periode satu tahun.

3. Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan lingkungan dibagi jumlah faktor risiko pada lingkungan dikali 100%.

Dari definisi tersebut, rumus penghitungannya menjadi :

$$N = X/Y \times 100\%$$

Keterangan:

N = Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan

X = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan

Y = Jumlah faktor risiko pada lingkungan

 $\frac{\textit{Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan}}{\textit{Target faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan}}x~100\%$

4. Capaian

Capaian indikator target dan realisasi kegiatan adalah , yang artinya setiap faktor risiko pada lingkungan pada tahun 2020 dapat dikendalikan

$$\frac{123}{123}$$
 X 100% = 100%

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Faktor Risiko Lingkungan yang dikendalikan
Tahun 2020 Di KKP Kelas II Padang



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari grafik tersebut diketahui bahwa capaian target dengan realisasi capaian kinerja indikator sebesar 111.11%. begitu juga perbandingan dengan target nasional dan target jangka menengah sebesar 111.11%.

Analisis keberhasilan capaian target dikarenakan semua sarana yang tidak memenuhi syarat dipenuhi seperti penyediaan sarana tempat cuci tangan dan menjaga kebersihan toilet oleh pemilik bangunan rumah makan. Capaian ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (155,55%) capaian KKP Padang lebih rendah.

5. Upaya/ Kegiatan yang dilakukan

Memberikan masukan kepada pemilik bangun/usaha untuk menyediakan fasilitas sanitasi dan memberikan penyuluhan kepada penjamah makanan untuk meningkatkan kebersihan hygine sanitasi ketika menjamah makanan.

6. Kendala/ Permasalahan

Terbatasnya lahan dan anggaran untuk membangun sarana sanitasi sehingga penyediakan sarana sanitasi tidak bisa optimal.

7. Pemecahan Masalah

Sarana sanitasi di rancang dengan sederhana dan tidak menghabiskan dana yang banyak seperti penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan galon

INDIKATOR KETIGA

INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA

1. Pengertian

Pintu masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk <u>pelabuhan</u>, <u>bandar udara</u>, maupun <u>pos lintas batas darat negara</u>,sedangkan wilayah merupakan tempat atau lokasi yang diduga terjangkit penyakit menular dan/atau terpapar faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan KKM. Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan peningkatan

kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan meliputi pengawasan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, yang masing-masing dilakukan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. (Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KKP menyelenggarakan 17 (tujuh belas) fungsi (Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan pelabuhan yang memenuhi syarat kesehatan guna kepentingan cegah tangkal penyakit dan member kesan estetika dan rasa nyaman maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian factor risiko di pintu masuk

2. Defenisi Operasional

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah kegiatan yang terdiri dari pengawasan terhadap faktor-faktor penyebab penyakit yang memenuhi syarat kesehatan sehingga terhindar dari penyakit akibat vektor dan menciptakan sanitasi lingkungan yang baik di wilayah pelabuhan/bandara sebagai gerbang pintu masuk negara. Faktor risiko yang dikendalikan berupa Indeks pinjal, HI Perimeter, Larva Anopheles, Kepadatan kecoa, Kepadatan lalat, Tempat-tempat umum, Tempat pengolahan makanan, dan tempat penyediaan air bersih.

3. Rumus / Cara Perhitungan

 $N = X/Y \times 100 \%$

Keterangan:

N = Persentase jumlah indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

X = Jumlah capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

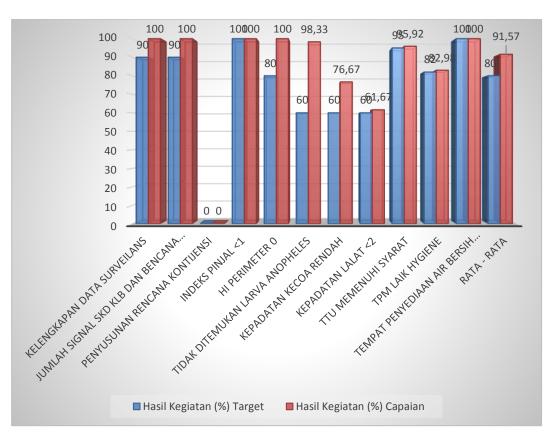
Jumlah Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara x 100% Target indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

4. Capaian Indikator

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Target dan hasil kegiatan Indeks Pengendalian Risiko di Pintu Masuk telah memenuhi dari target yag ditetapkan. Untuk melihat realisasi kegiatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.11
Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Pengendalian di Pintu Masuk di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang
Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari target 80 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk KKP Kelas II Padang, dicapai realisai sebesar 91,57, ini

berarti target indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk sudah memenuhi dan melebihi target.

114,46
120
91,57
100
80
60
40
20
Target Realisasi Persentase

Grafik 3.12
Persentase Target dan Capaian Kegiatan Indeks Pengendalian Faktor
Risiko di Pintu Masuk di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang
Tahun 2020

Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

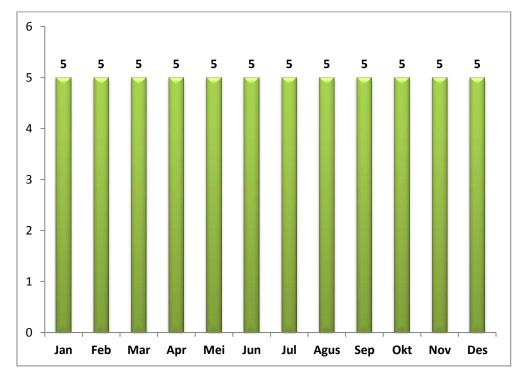
Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa target 80 Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk KKP Kelas II Padang, dicapai realisai sebesar 91,57 dengan persentase capaian sebesar 114, 46 %, ini berarti target indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk sudah memenuhi dan melebihi target bila dibandingkan dengan KKP Kelas II Pekanbaru (100%) capaian target kinerja KKP Kelas II Padang lebih tinggi.

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Surveilans Epidemiologi

Target kegiatan surveilans epidemiologi pada tahun 2020 adalah sebanyak 90 % kelengkapan laporan dan terealisasi sebesar 100% (60 laporan).

Grafik 3.13
Distribusi Laporan Surveilans Epidemiologi
Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan kegiatan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Grafik diatas menginformasikan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah surveilans epidemiologi yang dilaksanakan pada lima wilayah kerja KKP Kelas II Padang yaitu Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Sikakap dan Bandara Internasional dimana masing-masing lokasi setiap bulannya merealisasikan satu laporan surveilans epidemiologi.

2. Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP

Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di wilayah layanan KKP pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk pengawasan kedatangan kapal dan pesawat udara yang yang datang dari

Negara atau Wilayah Terjangkit penyakit Covid-19 dan penyakit menular lainnnya (Disease Outbreak New) berdasarkan informasi WHO melalui situs resminya.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengawasan terhadap kedatangan penumpang tersebut di pelabuhan dan bandara. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan Thermal scanner untuk mendeteksi suhu lebih dari 38°C. Hal ini dilakukan karena salah satu indikator untuk mengetahui seseorang menderita penyakit Covid-19 penyakit menular lainnnya (Disease Outbreak New) adalah suhu diatas 38°C.

Selama tahun 2020 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) kali sesuai dengan kedatangan kapal dan pesawat di pelabuhan dan bandara pada 5 wilayah kerja KKP Kelas II Padang yaitu kedatangan kapal sebanyak 1.175 kali dan kedatangan pesawat 194 kali . Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Feb Mei Jun Okt Nov Des Jan Mar Apr Jul Agus Sep Kapal **Pesawat** suhu ≥38°C

Grafik 3.14

Trend Pelaksanaan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD),
KLB dan Bencana Di Wilayah Layanan KKP Tahun 2020

Sumber: Laporan bulanan kegiatan kekarantinaan KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari grafik diatas dapat diketahui, bahwa kegiatan Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP Kelas II Padang Tahun 2020 dilaksanakan hampir setiap bulan, hanya pada kedatangan pesawat terjadi penurunan dari bulan Maret karena terjadi pembatasan perjalanan dari luar akibat pandemi Covid-19.

3. Penyusunan Rencana Kontijensi

Kegiatan penyusunan rencana kontijensi pada tahun 2020 tidak ada direncanakan di KKP Kelas II Padang. Jumlah dokumen rencana kontijensi yang ada di KKP Kelas II Padang sebanyak 3 dokumen, diantaranya kantor induk Teluk Bayur, wilker Bandara Internasional Mianngkabau, dan wilker Bungus.

4. Pengawasan dan Pengendalian Tikus

Salah satu indikator penilaian faktor risiko lingkungan di pintu masuk negara adalah indeks pinjal <1 pada tikus yang tertangkap, Indeks pinjal akan dihitung pada tikus yang tertangkap pada pemasangan perangkap tikus yang dilakukan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, pemasangan perangkap tikus dilakukan setiap 40 hari selama 5 hari berturut-turut mencakup seluruh area pelabuhan terutama di gudang-gudang dan rumah penduduk. Pemasangan perangkap dilakukan dengan menggunakan perangkap yang telah diberi umpan dan dilaksankaan pada sore hari dan diambil keesokan harinya.wialyah yang dilakukan pemasangan perangkap sebanyak 5 wilayah kerja yang terdiri dari : Pelabuhan Teluk Bayur,Bandara Internasional Minangkabau, Muara, Bungus dan Sikakap

555

Juri

555

Grafik 3.15
Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Pinjal pada Tikus Tertangkap di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang tahun 2020

Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

555

Nei

Dari Grafik tersebut dapat dilihat pada hasil identifikasi tikus yang tertangkap sebanyak 45 kali pemasangan perangkap dalam 1 tahun, tidak

40 20

555

555

Maret

ditemukan pinjal di lima (5) Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, dimana setiap wilayah kerja yang ada memenuhi standar yang ditergetkan dengan pinjal adalah 0. Dengan artian bahwa dari 100 % yang ditargetkan pinjal 0 tercapai di KKP Kelas II Padang.

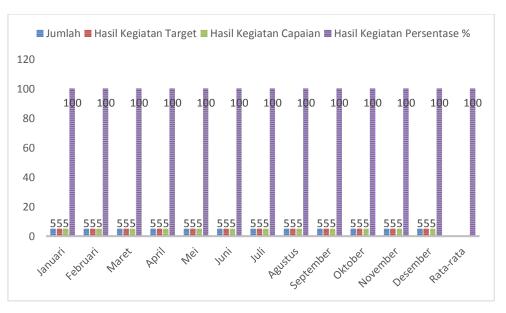
Capaian target ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (100%), capaian KKP Padang sama.

5. Survei Vektor DBD (Survei Larva)

Hasil kegiatan survei larva vektor penyebab penyakit *Yellow fever* dan DBD di daerah perimeter nilai *House Index (HI)* di targetkan setiap Wilker Pelabuhan dan Bandara 0% dengan arti bahwa untuk daerah perimeter KKP Kelas II Padang tidak ditemukan larva *Aedes sp* sebagai vektor penyebab penyakit *Yellow Fever* dan DBD.

Untuk nilai *House Indeks* Perimeter area pada wilayah kerja KKP Kelas II Padang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.16
Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Larva *Perimeter Area*di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang
Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari Grafik tersebut diketahui bahwa dari 60 kali (100%) kegiatan survei vektor DBD yang dilaksanakan pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dengan target HI Perimeter Area 0 di

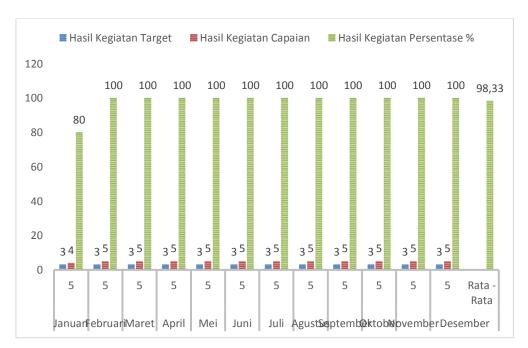
setiap wilayah kerja , terealisai sebanyak 100 %, yang artinya pada semua wilker (5 wilayah) KKP Kelas II Padang hasil HI perimeter adalah 0.

Capaian target ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (100%), capaian KKP Padang sama.

6. Survei Vektor Malaria (Tidak ditemukan larva Anopheles sp)

Survei vektor malaria dilakukan pada setiap bulannya pada seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, untuk tahun 2020, indeks larva nyamuk *Anopheles sp* di KKP Kelas II Padang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.17 Target dan Pencapaian Kinerja Indeks Larva *Anopheles sp* di Wilayah KerjaKKP Kelas II Padang Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari Grafik diatas diketahui bahwa dari target 36 kali (60 %) tidak ditemukan larva *Anopheles sp* di setiap wilayah kerja KKP Kelas II Padang, tercapai sebanyak 59 kali kegiatan (98,33 %) pada lima (5) wilker yang tidak ditemukan larva *Anopheles sp*.

7. Pengawasan Kepadatan Kecoa

Kegiatan pemantauan kepadatan dilakukan dengan cara pemasangan trap/jebakan kecoa pada tempat-tempat perindukan dan tempat yang diduga sebagai tempat adanya kecoa sebagai vektor penular penyakit. Tahun 2020 distribusi tingkat kepadatan kecoa berdasarkan wilayah kerja di KKP Kelas II Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

■ Jumlah Wilayah Kerja ■ Hasil Kegiatan Target ■ Hasil Kegiatan Capaian ■ Hasil Kegiatan Persentase (%) 500 460 450 400 350 300 250 200 150 100 80 80 80 100 76,67 60 60 50 5 3 3 5 3 4 5 3 4 3 3 Januari Maret Mei Juni September November Rata-rata

Grafik 3.18

Target dan Pencapaian Kinerja Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2020

Sumber : Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari Grafik tersebut diketahui bahwa dari 60 % target kepadatan kecoa rendah di lima (5) wilayah kerja KKP Kelas II Padang, tercapai sebanyak 76,67 %. Ini berarti pencapaian kinerja kepadatan kecoa rendah di KKP Kelas II Padang terpenuhi dan melebihi dari yang ditargetkan. Capaian target ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (100%), capaian KKP Padang sama.

8. Survei Kepadatan Lalat

Kegiatan Pemantauan vektor penyakit diare dilakukan dengan cara pemasangan *fly grill* pada tempat-tempat perindukan lalat sebagai vektor penular penyakit diare. Tahun 2020 distribusi tingkat kepadatan lalat berdasarkan kategori kepadatan lalat terhadap titik lokasi pemantauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 3.19
Target dan Pencapaian Kinerja Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja
KKP Kelas II Padang tahun 2020

Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari Grafik diatas diketahui bahwa dari 60 % target kepadatan lalat <2 di lima (5) wilayah kerja KKP Kelas II Padang, tercapai sebanyak 61,67 %. Ini berarti pencapaian kinerja kepadatan kecoa rendah di KKP Kelas II Padang terpenuhi dan melebihi dari yang ditargetkan.

9. Tempat – tempat Umum Memenuhi Syarat

Kegiatan TTU memenuhi syarat yaitu TTU yang diawasi di Pelabuhan dan Bandara dengan tujuan agar menciptakan lingkungan bersih dan sehat dan terhindar dari penyakit di lingkungan maupun tempat kerja. Kegiatan ini dari rencana 100 % pengawasan, selama tahun 2020 ditargetkan sebanyak 95 % TTU yang memenuhi syarat kesehatan. Untuk melilhat hasil kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

96 95,92 95,92 95,92 95,92 95,92 95,92 95,92 95,8 95,6 95,4 95,2 95 95 95 95 95 95 95 94,8 94,6 94,4 APRIL JUNI OKTOBER DESEMBER RATA-**FEBRUARI AGUSTUS** RATA ■ Persentase (%) Target ■ Persentase (%) Capaian

Grafik 3.20 Pengawasan TTU Memenuhi Syarat Kesehatan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

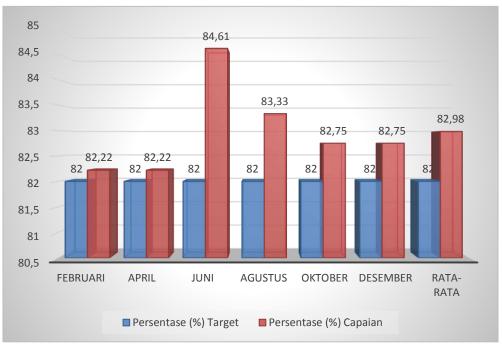
Dari Grafik tersebut diketahui bahwa dari 95 % target kegiatan TTU pada lima (5) wilayah kerja KKP Kelas II Padang, tercapai sebanyak 95,92 % TTU yang memenuhi syarat. Ini berarti pencapaian kinerja TTU memenuhi syarat sanitasi di KKP Kelas II Padang terpenuhi dan melebihi dari yang ditargetkan.

10. Tempat Pengolahan Makanan Laik Hygiene

Kegiatan pengawasan tempat pengolahan makanan laik hygiene yang yang diawasi di Pelabuhan dan Bandara dengan tujuan agar terhindar dari keracunan makanan dan penyakit bawaan makanan (food borne diseases) yang disebabkan oleh pengolahan makanan yang tidak memenuhi bersih, penjamah makanan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip PHBS dalam bekerja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap Tempat Pengolahan Makanan khususnya di wilayah kerja KKP Kelas II Padang.

Kegiatan ini dari rencana 100 % pengawasan, selama tahun 2020 ditargetkan sebanyak 82 % tempat pengolahan makanan yang laik hygiene. Untuk melilhat hasil kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 3.21
Target dan Pencapaian Kinerja
Tempat Pengolahan Makanan Laik Hygiene
di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang
Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

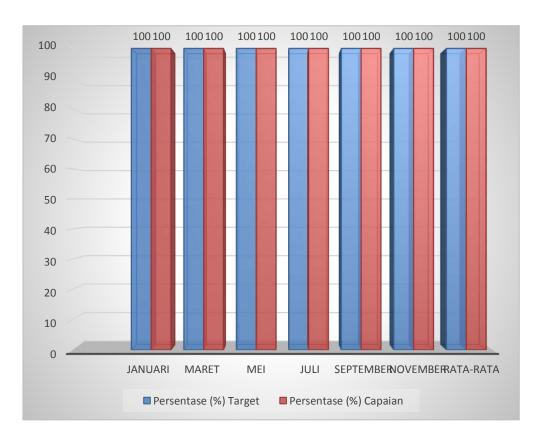
Dari Grafik diatas diketahui bahwa dari 82 % target kegiatan pengawasan TPM laik hygiene pada 5 (lima) wilayah kerja KKP Kelas II Padang,

tercapai sebanyak 82,98% TPM yang memenuhi syarat. Ini berarti pencapaian kinerja TPM laik hygiene di KKP Kelas II Padang terpenuhi dan melebihi dari yang ditargetkan.

11. Tempat Penyediaan Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Kegiatan penyediaan air bersih memenuhi syarat yaitu pengawasan/inspeksi sarana air bersih di pelabuhan dan bandara dengan tujuan agar menciptakan hydrant atau sarana sumber air bersih yang sehat dan terhindar dari penyakit akibat lingkungan. Untuk melilhat hasil kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 3.22
Target dan Pencapaian Kinerja Tempat Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas II Padang
Tahun 2020



Sumber: Laporan bulanan seksi PRL KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 100% kegiatan pengawasan Tempat Penyediaan Air Bersih, selama tahun 2020 pada lima (5) wilayah kerja KKP Kelas II Padang tercapai sebanyak 100% Tempat Penyediaan Air

Bersih yang memenuhi syarat, yang artinya semua Tempat Penyediaan Air Bersih memenuhi syarat sanitasi dan lingkungan.

b. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja

- Kelengkapan data Surveilans dikarekan setiap kegiatan wilker selalu mengirimkan data secara lengkap dan tepat waktu
- Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di wilayah layanan KKP dilaksanakan kurang dari >24 jam, dan selalu dilaporkan oleh petugas piket setiap ada kejadian.
- Indeks pinjal <1 pada tikus yang tertangkap di daerah perimeter dengan target adalah 100 % dan capaian 100 % pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang hal ini dikarenakan pelaksanaan pengendalian tikus yang rutin dilakukan serta baiknya partisipasi masyarakat dalam mengendalikan tikus dengan pemasangan perangkap pada area pelabuhan/bandara yang mempengaruhi keberadaan vektor tikus dan menciptakan indeks pinjal nol (0).
- HI Perimeter 0 pada area perimeter dengan target 80 % nol (0) dan capaian 100 % pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang hal ini dikarenakan dilaksanakannya larvasidasi pada area-area pemukiman serta sosialisasi yang baik kepada masyarakat sekitar wilayah Pelabuhan/Bandara.
- Tidak ditemukannya larva Anopheles dengan target adaalah 60 % dan capaian 98,3 % pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Hal ini dikarenakan terlaksananya kegiatan 3M plus sehingga meminimalisir keberadaan vektor Anophles pada area sekitar pelabuhan/bandara.
- Kepadatan kecoa rendah dengan target adalah 60 % dan capaian 76,67 % pada lima (5) Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang hal ini menunjukkan capaian melebihi dari target yang disebabkan oleh area sanitasi yang baik pada pelabuhan/bandara sehingga tidak memungkinkan keberadaan vektor kecoa, karena kecoa sangat senang hidup pada tempat yang kotor dan lembab.
- Kepadatan lalat <2 dengan target 60% dan capaian 61,67 % pada lima (5)
 wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Hal ini menunjukkan capaian melebihi dari target yang disebabkan oleh pelaksanaan spraying(pemercikan) tempat perindukan lalat yang rutin

- dilakukan menekan keberadaan vektor lalat selain meskipun masih adanya masyarakat yang membuang sampah pada tempat pembungan sampah sementara yang berserakan.
- Tempat tempat umum yang memenuhi syarat dengan target 95 % dan capaian 95,92 % pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, hal ini menunjukkan capaian melebihi dari target yang disebabkan oleh baiknya pemahaman masyarakat pelabuhan/bandara dengan kebersihan lingkungan tempat-tempat umum dan sosialisasi yang berkesinambungan turut merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik.
- TPM Laik Hygiene dengan target 82 % dan capaian target 82,98 % pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, hal ini menunjukkan capaian melebihi dari target yang dikarenakan baiknya pemahaman tenaga pengolah makanan dalam menciptakan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat yang ditentukan dimana hampir keseluruhan tempat pengolahan makanan area pelabuhan/bandara telah memiliki sertifikat laik hygiene, selain itu sosialisasi yang berkesinambungan juga menjadi faktor penentu menciptakan pemahaman pada tenaga pengolah makanan.
- Tempat penyediaan air bersih yang memenuhi syarat dengan target 100% dan capaian 100% pada lima (5) wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, hal ini menunjukkan capaian melebihi dari target yang disebabkan oleh terlaksananya pengawasan yang baik oleh petugas dalam mengawasi sarana air bersih yang memenuhi syarat secara konsisten dan berkesinambungan.

5. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- Meningkatkan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait dalam menciptakan wilayah kerja pelabuhan/bandara yang sehat dan bersih bebas dari vektor pengganggu.
- Selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelabuhan/bandara dan kader untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka menciptakan wilayah yang bersih dan bebas vektor.
- Menjalin kerjasama yang baik dengan kader-kader yang ada di wilayah pelabuhan/bandara guna menciptakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan dan wilayah bebas dari vektor penyakit.

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Kurangnya kerjasama antar stakeholder sehingga komunikasi lintas sektor kurang berjalan.
- Pandemic Covid-19 juga menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. dan mengharuskan melakukan penyesuaian dengan protokol kesehatan covid-19
- Masih adanya masyarakat sekitar pelabuhan yang membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sehingga menyebabkan sampah berserakan keluar dari TPS yang ada.

7. Pemecahan Masalah

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor agar mempermudah pelaksanaan kegiatan
- Melakukan kegiatan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan degan lancar serta terlindungi dari bahaya Covid-19
- Memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat area pelabuhan agara tidak
 lagi membuang sampah secara berserakan di luar TPS yang disediakan.

INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

1. Pengertian

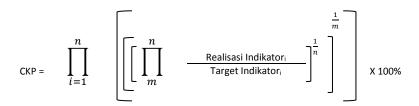
Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

2. Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik

3. Rumus/ CaraPerhitungan

a. Capaian Keluaran



CKK : Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Keterangan:

RVK : Realisasi volume Keluaran (Output) Kegiatan Target volume Keluaran (Output) Kegiatan Jumlah Keluaran (Output) Kegiatan

Jumlah indikator Keluaran (Output) Kegiatan

b. Penyerapan Anggaran

$$P = \frac{RA}{PA} X 100 \%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran RA : Akumulasi realisasi anggaran PA : Akumulasi pagu anggaran

c. Efesiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((PAKi \ x \ CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n} (PAKi \ x \ CKi)} \ x \ 100\%$$

Keterangan: : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

Cki : Capaian keluaran i

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\frac{RPDKn - (RPDKn - RAKn)}{RPDKn} \times 100\%)}{n}$$

: Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Keterangan:

RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan i

Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke

n

: Jumlah bulan

4. Capaian Indikator

Nilai SMART DJA KKP Kelas II Padang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 87,34. Dengan nilai tersebut, maka Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang termasuk dalam kategori "Baik".

Capaian target ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (109,73%), capaian KKP Padang lebih rendah.

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang ini terdiri dari:

Penyerapan Anggaran sebesar 92,06

Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang selama Tahun Anggaran 2020 telah direvisi sebanyak 5 (lima) kali. Di DIPA revisi 5 ini total anggaran yang diterima Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang menjadi Rp. 13.331.300.000,-, yaitu turun dari jumlah DIPA Awal sebesar Rp. 15.443.866.000,-.

- b. Konsistensi RPD Awal sebesar 78,39
- c. Konsistensi RPD Akhir senilai 83,45
- d. Capaian Keluaran Kegiatan sebesar 99,62

Dalam DIPA Revisi 5 ini jumlah target untuk Keluaran (*Output*) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk direvisi dari sebelumnya 1077 Layanan menjadi 1076 Layanan dengan persentase capaian sebesar 99,23%. Capaian tidak bisa terpenuhi 100% karena beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid19. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tersebut merupakan pertemuan dan sosialisasi yang tidak bisa dialihkan menjadi kegiatan *zoom meeting*.

e. Efesiensi sebesar 7.82.

Efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antar faktor input yang terbatas dan *output* yang dihasilkan. Dengan angka efesiensi sebesar 7,82% maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang masih termasuk dalam *range* efesiensi (batas maximal 20% dan minimal -20%).

5. Upaya/Kegiatan yang dilakukan

Menginput data Realisasi Volume Keluaran yang telah dikerjakan oleh setiap seksi dan subbag per bulan serta menghitung progress persentase capaian keluaran untuk setiap *output* yang ada dalam kegiatan ke aplikasi SMART DJA

6. Kendala/ Permasalahan

Banyak kegiatan seperti sosialisasi dan pertemuan, yang tidak bisa dialihkan melalui *zoom meeting*, tidak bisa dilaksanakan akibat kebijakan PSBB dalam masa pandemi Covid19.

7. Pemecahan Masalah

Adanya kebijakan Ditjen P2P atas Tindak Lanjut Perpres No. 72 Tahun 2020 agar satker merevisi Target dan Pagu Dana TA 2020 yang bersumber PNBP, maka dengan anggaran yang sudah dikurangi Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang bisa mencapai 92,06%.

INDIKATOR KELIMA

1. Pengertian

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah keandalan (reliability). Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 menyatakan bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi.

2. Definisi Operasional

Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi

3. Rumus/CaraPerhitungan

Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan

Jumlah total skor parameter dibagi jumlah total parameter dikali 100%

%
Tingkat Kepatuhan Penyampaian LK Bulanan =
$$\frac{\sum Total\ Skor\ Berdasarkan\ Parameter}{\sum Total\ Parameter}$$
 X 100%

100% = 500/ 500 X 100%

4. Capaian Indikator

Capaian indikaotr Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan adalah 100%. Sedangkan Capaian target kinerja Persentase Tingkat

Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan adalah 125%. Jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (125%), capaian KKP Padang adalah sama. Setiap bulannya capaian indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Padang Tahun 2020

No	Parameter	Sko- ring	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	De s
1	Ketepatan Waktu Upload Upload Pertama Sebelum Tgl 14 Bln brk.nya Upload Pertama Setelah Tgl 14 Bln brk.nya Belum Upload	100 50 0	100	100	100	100	100	100	100
2	Status Rekonsiliasi BAR Siap Download Menunggu TTD Kasi Vera Menunggu TTD KPA Analisa Hasil Rekon Menunggu SATKER Upload Ulang ADK Tidak Standar Proses Sistem Belum Upload	100 90 80 70 60 50 30	100	100	100	100	100	100	100
3	Hasil Rekonsiliasi Sudah Sama dan Tidak Terdapat TDK Masih Terdapat TDK Belum Upload	100 50 0	100	100	100	100	100	100	100
4	Rekonsiliasi Internal SAK> <simak-bmn ada="" belum="" masih="" perbedaan="" td="" terdapat="" tidak="" upload<=""><td>100 50 0</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></simak-bmn>	100 50 0	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Upload Di Bawah dan Sama Dengan 5 Kali Upload Di Atas 5 Kali Upload Belum Upload	100 50 0	100	100	100	100	100	100	100
	Total Skor 500			500	500	500	500	500	500
%T =	%Tingkat Kepatuhan Penyampaian LK Bulanan $= \frac{\sum Total \ Skor \ Berdasarkan \ Parameter}{\sum Total \ Parameter} X \ 100\%$			100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Upaya/Kegiatan yang dilakukan

Laporan Keuangan secara berkala disampaikan ke KPPN setempat melalui proses rekonsiliasi dengan menggunakan aplikasi e-rekon. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 14 adalah hari libur.

Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP2LK tersebut satker belum mengirimkan laporan keuangan (rekon) bulanan maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

6. Kendala/ Permasalahan

Keterlambatan rekonsiliasi data internal antara SIMAK BMN dengan SAI. Hal ini sering dikarenakan data persediaan dan BMN yang belum lengkap, seperti; stock opname yang belum selesai, atau BAST/SBBK droppingan dari pusat yang belum ada

7. Pemecahan Masalah

Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemegang persediaan yang berada di wilker, dan *contact person* yang menangani transfer keluar dari eselon yang mengirim persediaan/BMN

INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

1. Pengertian

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani secara cepat, tepat dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu dibangun pilot project dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Reformasi Birokrasi.

2. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

3. Rumus/ CaraPerhitungan

Nilai implementasi WBK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil. Oleh karena itu dihitung hanya 1 kali saja dalam 1 tahun berdasarkan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4. Capaian Indikator

Berdasarkan penilaian hasil Desk Review Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang oleh Tim Penilai Internal bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tanggal 6 Januari 2021 nilai Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang 79.84. Sehingga capaian target kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 114,05%.

Capaian target kinerja ini, jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (109,47%) capaian KKP Padang lebih tinggi.

Hasil Penilaian:

A. Komponen Pengungkit

Manajemen Perubahan : 7
 Penataan Tatalaksana : 5,25
 Penataan Sistem Manajemen SDM : 7,24
 Penguatan Akuntabilitas : 8,51
 Penguatan Pengawasan : 8,88
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 7,41
 Jumlah : 44,29

B. Komponen Hasil

Nilai Persepsi Korupsi : 14,44
 Persentase Penyelesaian TLHP : 5
 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan : 16,11
 Jumlah : 35,55

Total Nilai (Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil): 79,84

5. Upaya kegiatan yang dilakukan

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KKP Kelas II Padang telah melakukan:

- Menyusun rencana dan agenda kerja;
- Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
- Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kesehatan
 Pelabuhan Kelas II Padang

6. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Koordinasi dengan pihak Lintas Sektor masih lemah
- Tim WBK KKP Kelas II Padang masih belum bisa menyampaikan laporan kegiatan dalam tepat waktu
- Agent of Change (AoC) belum bisa berperan seperti yang diharapkan sehingga perubahan yang diinginkan belum terlaksana dengan baik.

7. Pemecahan Masalah

- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dengan cara mengadaan pertemuan dan sosialisasi
- Selalu mengingatkan dan menghimbau keada semua Tim WBK untuk dapat menyampaikan laporan tepat waktu
- Melaksanakan penguatan kapasitas Tim WBK secara berkesinambungan baik dalam bentuk Workshop, Outbond dan lainnya.

INDIKATOR KETUJUH

Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL

1. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

2. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%

$$\frac{\sum \textit{ASN yang ditingkatkan Kapasitas}}{\sum \textit{Seluruh ASN}} \times 100\%$$

$$47/68 \times 100\% = 69.11\%$$

3. Capaian Indikator

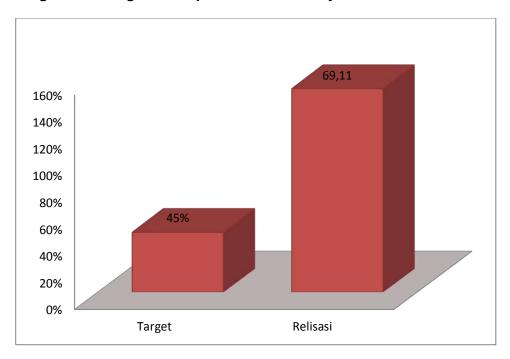
Capaian indikator Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian target 20 JPL per pegawai dalam kegiatan peningkatan kapsitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Capaian Kinerja Ka.KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Sasaran Program / kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen KKP	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	45% (31 org)	69,11% (47 org)	153,59

Untuk perbandingan target dan realisasi kegiatan Peningkatan Kapsitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.23
Perbandingan target dan realisasi
kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020



Dari grafik diatas dapat disimpulkan dari target yang di tetapkan bahwa 45% dari jumlah ASN KKP Kelas II Padang yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 tahun dapat tereaalisasi sebanyak 69,11%

Sehingga capaian target kinerja Peningkatan Kapsitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 151,61%. Capaian target kinerja ini,

jika dibandingkan dengan sesama KKP Kelas II lainnya, yaitu KKP Pekanbaru (151,61%) capaian KKP Padang sama.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Kegiatan keikutsertaan pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi dilakukan setiap bulan. Pada bulan Januari sampai pada bulan Desember 2020 jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi adalah sebanyak 47 orang. Jka dibandingkan dengan jumlah pegawai KKP Kelas II Padang yang mencapai 68 orang maka dapat dikatakan bahwa ada 69,11% pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan jika dibandingkan dengan target 31 orang (45%) yang memenuhi 20 JPL maka capaian adalah 153,59%.

5. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- Kurangnya lembaga yang melaksanakan peningkatan kapasitas baik berupa pelatihan,diklat, bimbingan teknis serta workshop melalui undangan tatap muka maupun daring.
- Seringnya terjadi gangguan terhadap sinyal internet pelatihan, diklat, bimbingan teknis serta workshop.

6. Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah :

- Mencari secara aktif badan atau lembaga pelatihan,diklat, bimbingan teknis serta workshop yang bisa meningkatkan Kapasitas ASN
- Menambah kuota internet dan kuota pemakaian zoom meeting.

C. REALISASI ANGGARAN

1. Sumber Anggaran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang adalah DIPA Tahun 2020 ,senilai Rp. 13.331.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.272.784.061,- atau 92.06%

Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas II Padang Tahun 2020

Output	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.063.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	375.000.000	374.923.350	99,98
2.063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	915.658.000	786.762.702	85,92
2.063.994	Layanan Perkantoran	10.878.815.000	10.046.001.853	92,34
4.249.001.001	Layanan pengendalian factor resiko lingkungan	51.316.000	49.911.047	97,26
4.249.001.002	Layanan Pengendalian factor risiko pada situasi khusus dan KLB	89.508.000	88.566.700	98,95
4.249.001.004	Layanan Pengendalian factor risiko pada alat angkut, orang, barang	575.918.000	537.425.855	93,32
4249.001.U01	Layanan Kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC	3.300.000	3.267.500	99,02
4249.001.U02	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan COP	30.000.000	29.992.000	99,97
4249.001.U05	Layanan Kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC	82.800.000	82.800.000	100,00
4249.001.U07	Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	1.000.000	-	0,00
4249.001.U14	Layanan Pengendalian Vektor DBD	42.440.000	30.703.600	72,35
4249.001.U15	Layanan Survei Vektor PES	113.881.000	98.248.500	86,27
4249.001.U16	Layanan Pengendalian Vektor Diare	8.660.000	7.214.200	83,30
4249.001.U17	Layanan Pengendalian Vektor Malaria	4.932.000	3.705.200	75,13
4249.001.U18	Layanan Survei Vektor DBD	76.800.000	74.094.200	96,48
4249.001.U19	Layanan Survei Vektor Malaria	39.672.000	24.016.050	60,54
4249.001.U20	Layanan Survei Vektor Diare	12.800.000	8.450.000	66,02
4249.001.U21	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	3.000.000	2.872.000	95,73
4249.001.U22	Layanan Deteksi Dini Terduga TB di Wilayah Kerja KKP	25.800.000	24.400.000	94,57
	Jumlah	13.331.300.000	12.273.354.757	92,06

Sebagian besar anggaran KKP Kelas II Padang tahun 2020 dipergunakan untuk layanan perkantoran (gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran)

Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

KKP Kelas II Padang Tahun 2020

No	Uraian	Pagu	Realisasi			
NO	Uraian Pagu		Jumlah	%		
1	Belanja Pegawai	8.275.820.000,-	7.567.565.107,-	91,44		
2	Belanja Barang	4.680.480.000,-	4.330.295.604,-	92,52		
3	Belanja Modal	375.000.000,-	374.923.350,-	99,98		

Realisasi belanja pegawai KKP Kelas II Padang tahun 2020 sebesar Rp. 112.272.784.061,- atau 92,06%. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan . Belanja barang sebesar Rp. 4.330.295.604,- atau 92,52% digunakan untuk membiayai layanan perkantoran dan kegiatan-kegiatan dari seksi/ bagian untuk pencapaian indicator kerja. Belanja modal sebesar Rp. 375.000.000,-atau 99,98% digunakan untuk pengadaan kendaran ambulance serta pengadaan fasilitas perkantoran.

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan
KKP Kelas II Padang Tahun 2020

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	12.062.946.000,-	11.101.982.609,-	92,03
2	PNBP	1.268.354.000,-	1.170.801.452,-	92,31
	Jumlah	13.331.300.000,-	12.272.784.061,-	92,06

2. Efisiensi Sumber Daya

Terkait dengan Pandemi Corona Virus yang berdampak pada realisasi Anggaran dan Belanja maka disusunlah efisiensi sumber daya agar menjamin semua indikator dalam perjanjian kinerja tetap mencapai target.

Beberapa upaya yang telah dilakukan yakni:

- 1. Merevisi target dan pagu PNBP
- Mempersingkat tahapan kegiatan tetapi tetap mempertahankan materi dan esensi kegiatan.

- 3. Melakukan revisi anggaran tanpa merubah pagu anggaran untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dalam kegiatan prioritas
- Melakukan revisi target pendapatan PNBP, mengingat kondisi pandemi Covid 19 yang mengakibatkan penurunan drastis dalam penerimaan PNBP
- Merevisi kegiatan Perjalanan dinas dengan pengadaan Bahan Habis Pakai seperti masker, handsanitizer, desinfektan dan bahan habis lainnya.
- 6. Memaksimalkan pengadaan Bahan Habis Pakai (APD, hand sanitizer, alcohol)
- 7. Kegiatan yang berbentuk pertemuan seperti sosialisasi/ workshop atau kegiatan lain yang mengundang pihak lintas sektor tidak diadakan disuatu tempat. Namun diganti dengan daring.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja KKP Kelas II Padang Tahun 2020

				%		
No	Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran	Kinerja	Efisiensi
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	375.000.000	374.923.350	98,54	100	1,46
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	915.658.000	786.762.702	98,08	100	1,92
3	Layanan Perkantoran	10.878.815.000	10.046.001.853	97,5	100	2,5
4	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	1.161.827.000	1.065.666.852	98,46	99,23	0,77
	Jumlah	13.331.300.000	12.273.354.757	92,06	99,81	1,66

Dari tabel 3.8 dapat dilihat beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran KKP Kelas II Padang tahun 2020 sebesar 92,06% sedangkan realisasi kinerja sebesar 99,81 % dengan efisiensi sebesar 1,66%

- Efisiensi tertinggi berada di Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar 1,92%.
 Hal ini karena adanya refocusing anggaran sehingga fokus kegiatan lebih diarahkan pada kegiatan berhias, media KIE dan lain sebagainya
- Realisasi kinerja terendah berada di Layanan Kekarantinan Kesehatan dimana anggaran yang direalisasikan lebih besar 98,46% dari pada kinerja yang dihasilkan 99,23%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat pengunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Tahun 2020 telah mencapai hasil yang cukup memuaskan yaitu rata-rata 125,69%. Pencapaian kinerja yaitu pencapaian indikator sasaran pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Tahun 2020 pada umumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 – 2024. Meskipun demikian ada beberapa indikator sasaran lagi yang harus ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan mutu perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, koordinasi rutin, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KKP Kelas II Padang tahun anggaran 2020

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KKP Kelas II Padang tahun 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Kelas II Padang tahun 2019

Laporan Keuangan KKP Kelas II Padang tahun 2020

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Permenkes RI No. 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Padang Tahun 2020 – 2024

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: dr.Jalil Alfani, M.Kes

Jabatan

: Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: dr. Anung Sugihantono, M. Kes

Jabatan

: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp.15.443.866.000,- berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Desember 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Anung Sugihantono, M. Kes NIP 196003201985021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya pengendalian faktor		1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	17.396
	risiko di Pintu masuk negara	2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	80%
2	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP		Nilai kinerja anggaran	80
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.981.014.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	12.462.852.000,-
	TOTAL	Rp.	15.443.866.000,-

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

dr. Anung Sugihantono, M. Kes NIP 196003201985021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: dr.Jalil Alfani, M.Kes

Jabatan

: Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: dr. Achmad Yurianto

Jabatan

: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp.15.443.866.000,- berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, -

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001 Jakarta, Maret 2020

Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2020
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	17.396
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	80 %
3	Meningkatnya tata	4	Nilai kinerja anggaran	80
	kelola manajemen KKP	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.981.014.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	12.462.852.000,-
	TOTAL	Rp.	15.443.866.000,-

Jakarta, Maret 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

H

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001

Direktur Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit,~



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: dr. Jalil Alfani, M.Kes

Jabatan

: Kepala Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: dr. Achmad Yurianto

Jabatan

: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 15.443.866.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001 Jakarta, Mei 2020

Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	75.580
	Masuk Negara dan Wilayah	2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	80%
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5 Persenta	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.981.014.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	12.462.852.000,-
	TOTAL	Rp.	15.443.866.000,-

Jakarta,

Mei 2020

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001

MATRIK ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG 2020 – 2024

	Sasaran Program (Outcome)/	Alokasi (Rp. ,-)					Donongering
No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung Jawab
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 21.052.	1.573.113	1.651.768	1.734.723	1.821.074	1.912.127	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%	291.733	306.319	321.634	337.715	354.601	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 80%	908.003	923.195	938.429	952.520	975.441	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
4	Nilai kinerja anggaran sebesar 85%	421.369	484.574	557.261	640.850	736.977	Subbag Adum
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 85%	276.580	318067	365.777	420.644	483.740	Subbag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80%	30.784	35.402	40.712	46.819	53.841	Subbag Adum
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 70%	317.703	365.358	420.162	483.187	555.665	Subbag Adum